



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



-  Jl. Pemuda No. 175 Semarang
-  Telp. / fax. (024) 3584086
-  <http://diskopumkm.semarangkota.go.id>
-  email: kopumkmsg@gmail.com



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/099/050/VIII/2024

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 dan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024, maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/097/VII/2024 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas. perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur. Djawa Tengah. Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tata Cara Penyusunan. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 108);
21. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024;

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 6 Agustus 2024

Pit. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



FX. BAMBANG SURANGGONO

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA
MIKRO KOTA SEMARANG
NOMOR : B/099/050/VIII/2024
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG
TAHUN 2024

**RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta indikatornya serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini belum sempurna, maka dari itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, 6 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

KOTA SEMARANG

FX. BAMBANG SURANGGONO, S.Sos



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. BAB I PENDAHULUAN	I-1
I.1 LATAR BELAKANG	I-1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	I-3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	I-7
II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2024	II-1
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	II-1
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	II-16
II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.....	II-19
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD	II-22
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..	II-30
III. BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-1
III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	III-1
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	III-7
IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG	IV-1
IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	IV-1
V. BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	II-2
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024	II-12
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II-16
Tabel 2. 4 Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	II-18
Tabel 2. 5 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 .	II-18
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	II-23
Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024	III-9
Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	IV-2

DAFTAR GAMBAR

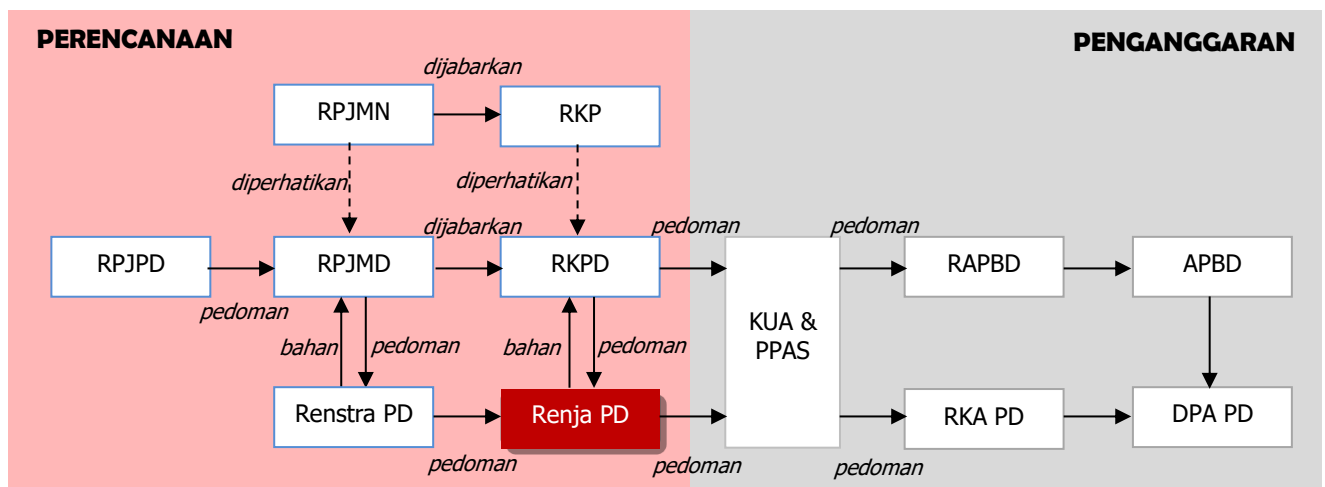
Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD I-1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



Gambar 1. 1
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2024 yang disebabkan oleh: (1) dinamika perekonomian dalam skala nasional maupun regional yang memerlukan penyesuaian baik dalam pendapatan maupun belanja daerah pada tahun berjalan; (2) untuk menyikapi perkembangan isu dan permasalahan aktual yang muncul di tahun 2023; (3) Perlunya penyesuaian target capaian pembangunan berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan II tahun 2024; serta (4) adanya Penyesuaian target pendapatan serta pagu indikatif.

Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2024.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
- v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

- w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
- x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
- y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);
- z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 37).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2024, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024;

- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2024.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2024

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2024 triwulan II, yang sudah menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024
dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100% (40%)	100% (20%)	50% (10%)	50,00	150	150,00
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	45 dok	18 dok	9 dok	5 dok	55,56	23	51,11
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	2 dok	1 dok	50,00	5	50,00
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	1 dok	100,00	3	60,00
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0 dok	0,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0 dok	50,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	2 dok	1 dok	0 dok	0,00	2	40,00
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	6 dok	3 laporan	3 laporan	100,00	9	60,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	15 jenis	6 jenis	3 paket	3 paket	100	9	60
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	25 jenis	10 jenis	5 paket	3 paket	60	13	52
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	35 jenis	-	-	-	-	35 Jenis	100
				12 Paket	12 paket	6 paket	50	18 Paket	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	8 paket	4 paket	50	12 Paket	100
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	2 Jenis	100
					12 dokumen	6 dokumen	50	6 Dokumen	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	6 laporan	50	12 Laporan	100
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	3 dokumen	60

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100,00	3	100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	2 unit	0 unit	0 unit	0,00	2	100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 Unit	100
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	25 unit	26 unit	26 unit	100,00	26 Unit	104
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	0	1 Unit	0	0	0	0
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	5 Jenis	100
					51 unit	51 unit	100,00	51 Unit	
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	100%	-	-	-	100%	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100% (40%)	100%	50%	50	100% (50%)	100 (50%)
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	100%	100
					55 orang	55 orang	100	55 Orang	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	-	-	-	100%	100
					12 dokumen	6 dokumen	50	6 dokumen	-
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	15 dok	6 dok	3 dok	1 dok	33,33	7 dok	46,67
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	2 laporan	1 laporan	0	0	2 Laporan	40,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00	5 Laporan	50,00
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	0%	0,00	3%	100,00
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	75 koperasi	30 koperasi	15 koperasi	0 koperasi	0,00	30 Koperasi	40,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 unit usaha	160 unit usaha	80 unit usaha	80 unit usaha	100	240 unit usaha	160,00
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	10 koperasi	1 koperasi	2 koperasi	0 koperasi	0,00	1 Koperasi	10,00
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 unit usaha	152 unit usaha	140 unit usaha	140 unit usaha	100	165 unit usaha	110,00
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50,55%	50%	33,97%	67,94	112,28	224,56
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	120 koperasi	370 koperasi	200 koperasi	285 koperasi	114,00	655	545,83

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 unit usaha	250 unit usaha	-	-	-	250 Unit usaha	142,86
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 unit usaha	240 unit usaha	-	-	-	120 unit usaha	68,57
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	-	-	250 unit usaha	33 Unit usaha	13,20	33 Unit usaha	-
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	35%	56,25%	32%	25,60%	80	85,65	224,71
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	70%	67,99%	68%	20,48%	30,12	88,47	126,39
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 unit usaha	335 unit usaha	250 unit usaha	102 unit usaha	40,80	335 unit usaha	111,67

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	45,36%	10%	23,64%	236,4	86,66	866,60
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	80%	76,63%	75%	92%	122,67	168,63	210,79
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	482 orang	580 orang	304 orang	52,41	786	196,50
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	30%	26,37%	27%	30,16%	111,70	56,63	188,77
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	60%	50%	37,63%	75,26	97,63	195,26
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	2910 Orang	-	-	-	2910 Orang	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
		Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	500 unit usaha	277 unit usaha	55,40	277 Unit usaha	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	6,24%	3%	2,74%	91,33	9,38	31,27
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3000 orang	2806 orang	2270orang	788 orang	34,71	3594 orang	119,8
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 unit usaha	635 unit usaha	-	-	-	635 Unit usaha	127
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha	500 unit usaha	200 unit usaha	100 unit usaha	0 unit usaha	0,00	450 orang	90
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1000 unit usaha	491 unit usaha	410 unit usaha	118 unit usaha	28,78	609 orang	60,9
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1000 orang	580 orang	500 orang	400 orang	80,00	980 orang	98

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	900 orang	1260 orang	270 orang	21,43	1170 orang	156
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	25%	47,89%	20%	38,70%	193,5	88,71	354,84
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	600 orang	200 orang	100 orang	958 orang	958,00	1.058	176,33
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.000 unit usaha	3680 unit usaha	500 unit usaha	1.029 unit usaha	205,8	4709	156,97
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	1 paket	-	-	-	1 paket	100

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2023

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan Triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator program sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 4 indikator kinerja program dengan predikat tercapai (termasuk program penunjang) , 3 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dimana koperasi mengalami kesulitan dalam proses pemenuhan syarat ijin usaha simpan pinjam yang baru antara lain adalah Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-.

b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 serta realokasi anggaran. Adapun rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 2
Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang
Triwulan II Tahun 2024

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.185.617.086	6.297.299.818	51,68
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.493.300	697.225	1,08
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.738.600	0	0,00
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.658.900	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.258.900	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.934.900	697.225	36,03
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.234.900	0	0,00
2	17	1	2.01	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.667.100	0	0,00
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.433.634.600	5.616.669.025	53,83
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.181.984.000	5.491.248.825	53,93
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250.080.000	124.860.000	49,93
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	673.400	406.900	60,42
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	897.200	153.300	17,09
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.553.209	476.198.350	54,83
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.902.655	164.680.000	96,36
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.263.210	6.035.000	22,98
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.222.030	10.981.800	22,77
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.393.742	4.505.055	14,35
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	475.000	24,74
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	26.548.765	53,10
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464.965.860	188.622.730	40,57
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	74.885.712	74.350.000	99,28

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.890.037	19.500.000	43,44
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	23.647.700	19.500.000	82,46
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.242.337	0	0,00
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.660.000	52.189.577	16,38
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	318.660.000	52.189.577	16,38
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.385.940	132.045.641	29,00
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	7.605.018	19,04
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.250.840	115.415.623	31,17
2	17	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	1.236.240	0	0,00
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.948.860	9.025.000	20,54
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	160.941.690	116.951.900	72,67
2	17	2	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	54.683.900	66,24
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.558.990	54.683.900	66,24
2	17	2	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	62.268.000	79,44
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	78.382.700	62.268.000	79,44

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	521.133.000	305.482.840	58,62
2	17	3	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	521.133.000	305.482.840	58,62
2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	521.133.000	305.482.840	58,62
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	395.912.380	204.936.665	51,76
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	395.912.380	204.936.665	51,76
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	395.912.380	204.936.665	51,76
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	710.300.000	301.865.822	42,50
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	710.300.000	301.865.822	42,50
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	710.300.000	301.865.822	42,50
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.686.334.793	875.790.970	32,60
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.686.334.793	875.790.970	32,60
2	17	6	2.01	1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.686.334.793	875.790.970	32,60

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.635.626.628	1.131.907.641	31,13
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	3.635.626.628	1.131.907.641	31,13
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	230.000.000	2.714.191	1,18
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.583.683.800	363.972.315	22,98
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	468.025.000	232.954.285	49,77
2	17	07	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	1.353.917.828	532.266.850	39,31
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.413.599.717	1.589.221.475	29,36
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5.413.599.717	1.589.221.475	29,36
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5.413.599.717	1.589.221.475	29,36
JUMLAH						25.709.465.294	10.823.457.131	42,10

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2024 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 25.709.465.294 yang bersumber dari APBD.

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 10.823.457.131. Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 14.886.008.163.

II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 3
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI						PROYEKSI
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024 TW II	2025	2026	2024
Tujuan:														
Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	-	65,42	58,91	40,49	-	-	55,00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	-	16,93	17,17	17,25	-	-	17,30
Sasaran:														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	88,61	76,63	77,04	77,17	-	-	77,20
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	40,58	42,53	43,22	-	-	44,00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,50	81,08	79,71	80	80,25	-	-	80,25

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”, sampai dengan Triwulan II 2024 tercapai sebesar 40,49 % dari target sebesar 55,00 % atau baru sebesar 73,62 %.
- b. Tujuan **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2024 sudah sebesar 17,25 % dari target sebesar 14,00% (capaian sebesar 123,21 %);
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2024 sudah sebesar 77,17% dari target sebesar 77,00% (capaian sebesar 100,22%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 telah dapat melebihi target dengan capaian realisasi sebesar 43,22 % dari target 40,00 % (capaian sebesar 108,05 %);
- e. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2024 realisasinya sebesar 80,25% dari target sebesar 77,75% (capaian sebesar 103,21%);

Selain dari aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 4
Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI KINERJA		PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	TW. II 2023	2023	2024
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Selanjutnya, selain realisasi dari target Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2. 5
Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA		PROYEKSI		CATATAN
			2022	2023	2024	2025	2026	2023	TW.II 2024	2024	2025	
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Persentase koperasi aktif	%	76%	76,50%	77%	77,5%	78%	77,04%	77,17%	77,20%	77,50%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12%	13%	14%	15%	16%	17,17%	17,25%	17,30%	17,50%	
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	55%	56%	57%	58,91%	40,49%	55%	56%	

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah 2 indikator sudah melampaui target yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Indikator Meningkatnya usaha Mikro menjadi wirausaha, sedangkan 1 indikator yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih dalam tahap pencapaian target.

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKD di atas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga berupaya untuk mengakomodir program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang agar responsif terhadap isu gender. Data menunjukkan dari 8 program, 14 kegiatan, dan 36 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2024, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif terhadap isu gender (telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebanyak 2 program (25%), 2 kegiatan (14,29 %) dan 3 sub kegiatan (8,33 %). Adapun untuk jumlah anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2024 adalah sebesar Rp 25.709.465.294,- sementara jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 2.697.733.798,- (10,49 %).

II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2024 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang

- b. Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/Non Perbankan;
- c. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.
- d. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro di Kota Semarang tentang strategi pemasaran modern serta pemanfaatan teknologi digitalisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Optimalisasi pelatihan Perkoperasian dan Uji Kompetensi bagi pengelola Koperasi dan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro;
- b. Melaksanakan fasilitasi kolaborasi antara usaha mikro dan Perusahaan besar serta Lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses terhadap modal dan pembiayaan.
- c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- d. Memberikan pelatihan pemasaran secara online, melaksanakan kemitraan dengan marketplace secara berkelanjutan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
 - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.

- Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mikro untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital.
- kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
- Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.
- Kemampuan dan Pengetahuan Teknologi Informasi KUMKM masih terbatas.

b. Peluang:

- Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- Adanya komitmen kebijakan dari Pemerintah terkait kemudahan Perijinan dan penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas yang memaksa UMKM untuk berkompetisi.
- Beragamnya Produk UMKM serta Sumber daya alam yang masih melimpah.
- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Perlunya peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro supaya lebih mempunyai daya saing.
2. Perlunya mendorong Peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.
3. Belum optimalnya akses Pemasaran dan pemanfaatan teknologi digitalisasi terhadap peluang pasar.
4. Belum optimalnya respon dari Pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPd Kota Semarang Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

No	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					24.169.289.780	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					24.169.289.780
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	160.941.690	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Kota Semarang	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	160.941.690	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	82.558.990	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 Kop	82.558.990	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	82.558.990	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	82.558.990	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	78.382.700	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 Kop	78.382.700	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	78.382.700	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	78.382.700	

No	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	475.289.000	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	475.289.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	475.289.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	475.289.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	475.289.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Unit Usaha	475.289.000	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	32 Persen	304.231.220	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	32 Persen	304.231.220	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	60%	304.231.220	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	304.231.220	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	300 Unit Usaha	304.231.220	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 Unit Usaha	304.231.220	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	657.194.500	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	657.194.500	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	70%	657.194.500	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75%	657.194.500	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	360 org	657.194.500	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	580 org	657.194.500	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2.507.615.933	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Kota Semarang	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	2.507.615.933	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.507.615.933	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	2.507.615.933	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	400 org	2.507.615.933	Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	2.507.615.933	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.309.150.906	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Kota Semarang	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3.309.150.906	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	3.309.150.906	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	3.309.150.906	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	228.341.940	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 Unit Usaha	228.341.940	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 Unit Usaha	1.424.782.650	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	360 org	1.424.782.650	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 org	415.340.000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 org	415.340.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 org	1.240.686.316	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1260 org	1.240.686.316	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	4.963.346.885	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Kota Semarang	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	4.963.346.885	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	4.963.346.885	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Semarang	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	4.963.346.885	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	4.963.346.885	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha	4.963.346.885	
	NON URUSAN					NON URUSAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.791.519.646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.791.519.646	
		Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	64.493.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	64.493.300	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	29.738.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dok	29.738.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.658.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.658.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.258.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	4.258.900	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.934.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1.934.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.234.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	2.234.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.667.100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	22.667.100	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	9.973.739.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Semarang	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	9.973.739.600	
			Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%				Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	9.722.089.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 org/bln	9.722.089.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	250.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	250.080.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	673.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	897.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	897.200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	971.558.446	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Semarang	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	971.558.446	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	170.543.255	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	170.543.255	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	126.131.020	Penyediaan Peralatan Rumah Tangg	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	126.131.020	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	48.222.030	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	48.222.030	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	31.825.569	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	31.825.569	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	468.030.860	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	468.030.860	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	74.885.712	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	74.885.712	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	20.276.760	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	20.276.760	
	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	20.276.760	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	20.276.760	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	318.660.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100 Persen	318.660.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.660.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	318.660.000	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	442.791.540	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Semarang	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100 Persen	442.791.540	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.950.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	370.250.840	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	370.250.840	
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	32.590.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	32.590.700	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
2.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
4.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng	1 Kegiatan	Diakomodir
5.	Bantuan Modal usaha ekonomi Produktif bagi UMKM	Kelurahan Sendangmulyo	25 Orang	Tidak diakomodir (Dinas hanya memfasilitasi akses Pembiayaan bukan Bantuan Modal Usaha)
6.	Bazar UMKM se kelurahan Bulusan	Kelurahan Bulusan	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena Dinkop menyelenggarakan pameran pada Tingkat Kota (bisa diakomodir Kecamatan)
7.	Pelatihan pemasaran dan manajemen usaha	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
8.	Pelatihan pembuatan garnis dan pelatihan packing	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
9.	Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Costing Bagi UMKM Agar Tidak Rugi	Kelurahan Jangli	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)
10.	UMKM Kelurahan Kedungmundu pemasaran secara online kurang berjalan	Kelurahan Kedungmundu	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan digitalisasi Pemasaran)
11.	Pelatihan packadging produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis Produknya
12.	Pelatihan Manajemen pemasaran produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir
13.	Pelatihan Sertifikasi Produk UMKM	Kelurahan Tambakrejo	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis sertifikasi produknya (Halal, PIRT,HAKI)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

Disamping itu juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yaitu :

1. Event yang dapat menggerakkan roda perekonomian di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan agar ditingkatkan terutama pemberdayaan UMKM.
2. Pemkot Semarang diharapkan membantu UMKM dengan modal usaha, alat dan juga pelatihan agar lebih memaksimalkan produktivitas usahanya.
3. Diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif.
4. Perlu pelatihan Marketing di jaman digital untuk UMKM
5. Perlu upgrade UMKM di jaman digital

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

III.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Perencanaan pembangunan Nasional pada tahun 2024 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Tema pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”** dengan memperhatikan 5 (lima) arahan utama Presiden Republik Indonesia terkait fokus pembangunan tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Meminimalkan kendala terkait regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kebijakan di tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas guna transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan arah kebijakan:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
5. Penguatan daya saing usaha;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan pemilu 2024.

7 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,70%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00 – 5,70%
3. Rasio Gini nilai 0,374 – 0,377
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nilai 73,99 – 74,02
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27
6. Nilai Tukar Petani (NTP) nilai 105 – 108
7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) nilai 107 – 110
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,70 – 7,50%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada “**Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Adapun Target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,70 – 5,50%
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,43
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,06 – 8,96%
4. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,44 – 4,94%

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 adalah “**Pemantapan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Yang Didukung Oleh Penguatan Struktur yang Mendukung Keberlanjutan**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan **ekonomi** yang berkualitas dan berkeadilan;
- Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan **pengangguran** dan **kemiskinan** serta penghapusan **kemiskinan ekstrem**

Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas **Sumber Daya Manusia** yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas Daerah 4. Penyediaan **infrastruktur** untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota;

Prioritas Daerah 5. Peningkatan **tata kelola pemerintahan** yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, dengan fokus:

- a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah;
- b. Peningkatan nilai investasi;
- c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis potensi lokal;
- d. Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi;
- e. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- f. Penguatan ketahanan pangan berbasis wilayah.

Untuk mencapai prioritas 1 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui pengendalian inflasi dalam bentuk:

- a. Melaksanakan operasi pasar murah;
- b. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang;
- c. Kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
- d. Gerakan menanam;
- e. Merealisasikan BTT;
- f. Dukungan transportasi dari APBD;
- g. Rapat teknis TPID;
- h. Pemantauan harga dan stok;
- i. Menjaga pasokan;

- j. Inventarisasi informasi daerah surplus;
- k. Bantuan sosial.

2. Percepatan pengurangan pengangguran dan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan fokus:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin;
- b. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin;
- c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
- d. Pengembangan Kampung Tematik Produktif;
- e. Pengembangan kesatuan sistem *demand and supply set* tenaga kerja;
- f. Intervensi yang terintegrasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat guna mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai prioritas 2 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui Penghapusan Kemiskinan Ekstrem:

- 1) Administrasi kependudukan;
- 2) Bantuan sembako;
- 3) Jaminan kesehatan;
- 4) Penanganan stunting & gizi buruk;
- 5) Alat bantu penyandang disabilitas;
- 6) Pelayanan pendidikan;
- 7) Rehab rumah tidak layak huni;
- 8) Sanitasi permukiman;
- 9) Sumber air bersih;
- 10) Pelayanan ketenagakerjaan;
- 11) Pemberdayaan UMKM;
- 12) Pelayanan keluarga berencana;
- 13) Pengembangan pertanian/perikanan/peternakan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, berdaya saing, kompetitif, dan produktif, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi;
- b. Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh (paripurna) yang berkualitas, bermutu, dan *accessible*;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak;

- d. Peningkatan upaya pengendalian penduduk;
- e. Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya unggulan Prioritas 3, Penanganan Stunting:

1) Sensitif

- Edukasi (Gizi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
- Pemanfaatan Pekarangan untuk Gizi Keluarga (Urban Farming);
- Penanganan Kawasan Kumuh;
- Pemberdayaan Ekonomi.

2) Spesifik

- Treatment balita gizi kurang dan stunting di Rumah Pelita/Daycare dan Pelangi Nusantara;
- PMT Balita Stunting (Pilot Project Tj. Mas);
- PMT Posyandu Rp. 350.000/bulan.

4. Penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang mendukung pengembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar kota, dengan fokus:

- a. Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan;
- b. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman;
- d. Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh;
- e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang terpadu;
- f. Penguatan ketahanan bencana.

Untuk mencapai prioritas 4 tersebut, dilaksanakan upaya unggulan melalui penanganan Banjir:

- 1) Tanggul Tambaklorok;
- 2) Sungai Plumbon;
- 3) Sungai Penggaron.

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif untuk mendukung penyelesaian isu dan permasalahan kota, dengan fokus:

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan;
- d. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;
- e. Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Upaya unggulan Prioritas 5:

- 1) *Smart City*;
- 2) Penguatan Inovasi;
- 3) SPBE (Sisten Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2024 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2024, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,7 – 6,5%
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,40 – 86,00
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 4,00 – 3,82%
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 7,60 – 6,50%

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2023, yaitu:

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi**
- 2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro**

dengan indikator tujuan :

- 1. Persentase Koperasi yang Berkualitas**
- 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi**
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Koperasi aktif**
- b. Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**
- c. Nilai AKIP**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kota Semarang Tahun 2024

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET
TUJUAN :			
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	55,00
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	14,00
SASARAN :			
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	- Persentase Koperasi aktif	%	77,50
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	44,00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	%	80,25

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2021-2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Secara umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang bertugas mendukung pencapaian Misi ke 2 “Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila”. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Laju Pertumbuhan ekonomi” dan indikator sasaran “ Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa terhadap PDRB”.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. 1
Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	3%	3%	3%	160.941.690	160.941.690	160.941.690	APBD	
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam	15 kop	15 kop	15 kop	82.558.990	82.558.990	82.558.990	APBD	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	82.558.990	82.558.990	82.558.990	APBD	
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	2 kop	2 kop	2 kop	78.382.700	78.382.700	78.382.700	APBD	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	78.382.700	78.382.700	78.382.700	APBD	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	50%	50%	666.228.580	521.133.000	475.289.000	APBD	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 koperasi	100 koperasi	100 koperasi	666.228.580	521.133.000	475.289.000	APBD	
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	370 unit usaha	370 unit usaha	370 unit usaha	666.228.580	521.133.000	475.289.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi sehat	32%	32%	32%	250.816.800	395.912.380	304.231.220	APBD	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	68%	68%	250.816.800	395.912.380	304.231.220	APBD	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 unit usaha	250 unit usaha	250 unit usaha	250.816.800	395.912.380	304.231.220	APBD	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	10%	10%	560.300.000	710.300.000	657.194.500	APBD	
		Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%	1%	1%					
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	75%	75%	75%	560.300.000	710.300.000	657.194.500	APBD	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	200 org	200 org	200 org	560.300.000	710.300.000	657.194.500	APBD	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat omsetnya	27%	27%	27%	2.636.334.793	2.636.334.793	2.507.615.933	APBD	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha	50%	50%	50%	2.636.334.793	2.636.334.793	2.507.615.933	APBD	
2.17.06.2.01.01	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	2.636.334.793	2.686.334.793	2.507.615.933	APBD	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3%	3%	3%	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906	APBD	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	600 org	600 org	3.491.708.800	3.635.626.628	3.309.150.906	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	100 unit usaha	100 unit usaha	100 unit usaha	230.000.000	230.000.000	228.341.940	APBD	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	200 unit usaha	200 unit usaha	200 unit usaha	1.483.683.800	1.583.683.800	1.424.782.650	APBD	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	200 org	200 org	200 org	468.025.000	468.025.000	415.340.000	APBD	
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	200 org	200 org	200 org	1.310.000.000	1.353.917.828	1.240.686.316	APBD	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	20%	20%	20%	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885	APBD	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	100 org	100 org	100 org	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885	APBD	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 unit usaha	500 unit usaha	500 unit usaha	5.457.517.545	5.413.599.717	4.963.346.885	APBD	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	100%	100%	12.285.617.086	12.185.617.086	11.791.519.646	APBD	
		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%	100%	100%					
		Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%	100%	100%					
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	9 dok	9 dok	64.493.300	64.493.300	64.493.300	APBD	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2 dok	29.738.600	29.738.600	29.738.600	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	3.658.900	3.658.900	3.658.900	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	4.258.900	4.258.900	4.258.900	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.934.900	1.934.900	1.934.900	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	2.234.900	2.234.900	2.234.900	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	22.667.100	22.667.100	22.667.100	APBD	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan SKPD	100%	100%	100%	10.433.634.600	10.433.634.600	9.973.739.600	APBD	
		Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD	3 dok	3 dok	3 dok					
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 org/bln	64 org/bln	64 org/bln	10.181.984.000	10.181.984.000	9.722.089.000	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 dok	10 dok	10 dok	250.080.000	250.080.000	250.080.000	APBD	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	673.400	673.400	673.400	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 lap	2 lap	2 lap	897.200	897.200	897.200	APBD	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	100%	100%	968.553.209	868.553.209	971.558.446	APBD	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	170.902.655	170.902.655	170.543.255	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket	5 paket	5 paket	26.263.210	26.263.210	126.131.020	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 paket	20 paket	20 paket	48.222.030	48.222.030	48.222.030	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	31.393.742	31.393.742	31.825.569	APBD	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dok	2 dok	2 dok	1.920.000	1.920.000	1.920.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 lap	50 lap	50 lap	50.000.000	50.000.000	50.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 lap	50 lap	50 lap	564.965.860	464.965.860	468.030.860	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	74.885.712	74.885.712	74.885.712	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024	Renja 2024	APBD TA 2024	Perubahan Renja 2024		
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	44.890.037	44.890.037	20.276.760	APBD	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	23.647.700	23.647.700	20.276.760		
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	2 unit	21.242.337	21.242.337	0		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor	100%	100%	100%	318.660.000	318.660.000	318.660.000		
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	318.660.000	318.660.000	318.660.000		
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan aset SKPD	100%	100%	100%	455.385.940	455.385.940	442.791.540		
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	1 unit	39.950.000	39.950.000	39.950.000		
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit	24 unit	24 unit	370.250.840	370.250.840	370.250.840		
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1.236.240	1.236.240	0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	30 unit	43.948.860	43.948.860	32.590.700		
JUMLAH						25.509.465.294	25.709.465.294	24.169.289.780		

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2024

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2024, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 pada triwulan empat tahun 2024.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2024.

Semarang, 6 Agustus 2024

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KOTA SEMARANG



FX. BAMBANG SURANGGONO, S.Sos